



RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA SEMARANG



Kirim Email Di Sini
kopumkmsmg@gmail.com



Kunjungi Laman Kami
www.diskopumkm.semarangkota.go.id



2026

Jl. Pemuda No. 175 Semarang
Telp. / fax. (024) 3584086



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
NOMOR : B/7367/050/XII/2025

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 maka perlu disusun Rencana kerja Tahun 2026;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
- o. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
- p. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
- q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026;
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026;

- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2026;
- KEEMPAT : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Desember 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA /

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Bappeda Kota Semarang;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG TAHUN 2026



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2026 dapat tersusun. Dengan adanya Renja ini maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang telah mempunyai suatu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan demi kelancaran pembangunan Kota Semarang serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk jangka waktu satu tahun. Renja tersebut memuat prioritas kegiatan pembangunan, sasaran kegiatan, rencana kerja, dan pendanaannya, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Mengingat pentingnya peranan Renja sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimana kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Semarang, 11 Desember 2025

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 LATAR BELAKANG	I-1
I.2 LANDASAN HUKUM	I-2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU	II-1
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	II-1
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	II-22
II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	II-31
II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD	II-34
II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	II-47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	III-1
III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	III-1
III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	III-5
III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	III-6

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG **IV-1**

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN..... IV-1

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG IV-13

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024II-2

Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024II-19

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024II-22

Tabel 2. 4 Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024II-24

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024II-25

Tabel 2. 6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Responsif Gender Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ...II-28

Tabel 2. 7 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai DenganTahun 2024II-30

Tabel 2. 8 Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota SemarangII-39

Tabel 2. 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota SemarangII-47

Tabel 2. 10 Usulan Pokir DPRD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.....II-50

Tabel 3. 1 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026III-3

Tabel 3. 2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026III-6

Tabel 3. 3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026III-7

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota SemarangIV-3

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha MikroIV-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD I-1

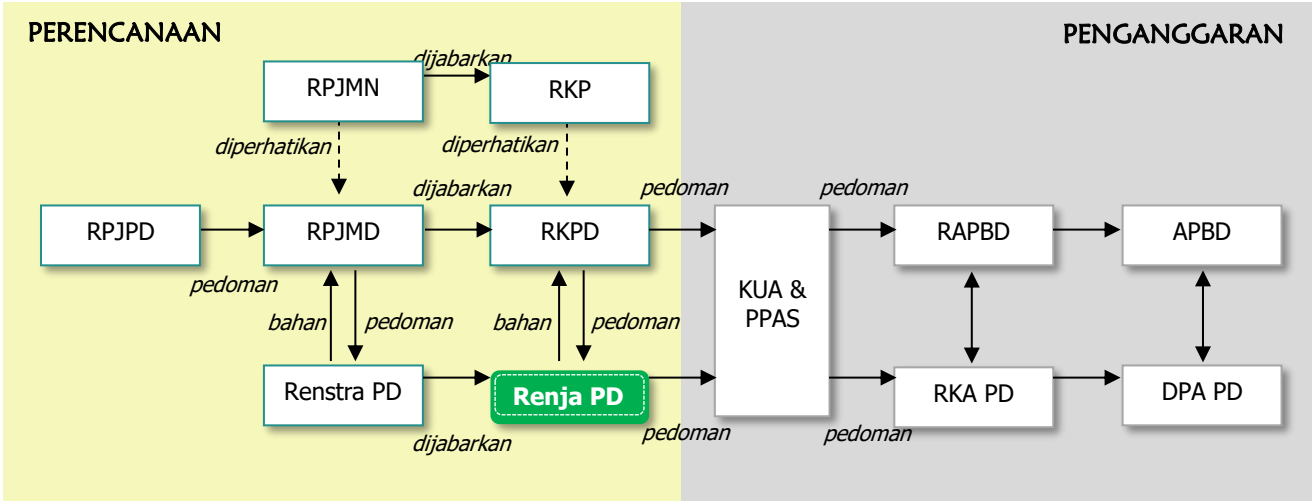
Gambar 3. 1 Visi, Tema, dan Program Prioritas Pembangunan Nasional.....III-1

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
- u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN	Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU	Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026.
BAB V	PENUTUP	Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	46 dok	18 dok	11 dok	11 dok	100%	9 dok	36 dok	78,26%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	4 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	10 dok	100%
		Jumlah Dokumen Renstra SKPD	1 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	6 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	12 dok	80%
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 jenis	100%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	50 Paket	74 Paket	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 paket	8 Paket	100%	8 Paket	8 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	100%
					12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	500 orang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	80%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	80%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	133,33%	2 Dokumen	5 dokumen	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%	100% (40%)
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 jenis	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	10 Unit	19 Unit	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	3 Unit	5 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%	100% (40%)
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 laporan	-	12 laporan	24 laporan	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%	100% (40%)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	25 unit	26 unit	26 unit	100%	27 Unit	27 Unit	108%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	0	1 unit	0	100%	1 Unit	1 Unit	80%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	5 jenis	-	-	-	-	5 Jenis	100%
			-	-	51 Unit	51 Unit	100%	70 Unit	70 Unit	-
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%	100% (40%)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%	100% (40%)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
					55 orang	55 orang	100%	77 orang/ bulan	77 orang/ bulan	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
					12 dok	12 dok	100%	12 dok	24 dok	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	6 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	12 dok	80%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 laporan	80%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 dok	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	7 laporan	70%
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3% (100%)	3% (0,6%)	3%	0,%	0,00%	3%	6%	200%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	30 koperasi	15 koperasi	28 koperasi	186,67%	15 koperasi	73 koperasi	97,33%
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 koperasi	160 unit usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	100%	25 Unit Usaha	265 Unit Usaha	176,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	1 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	100%	2 koperasi	5 koperasi	50%
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 koperasi	152 unit usaha	140 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150%	25 Unit Usaha	327 Unit Usaha	218%
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50% (100%)	50,55% (10,1)	50%	68,34%	136,68%	50%	50%	100%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	370 koperasi	200 koperasi	100 koperasi	50%	100 koperasi	570 koperasi	690,83%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 koperasi	250 Unit Usaha	-	-	-	-	250 Unit Usaha	142,86%
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 koperasi	240 Unit Usaha	-	-	-	-	240 Unit Usaha	208,33%
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	250 unit usaha	503 unit usaha	201,20%	250 Unit Usaha	753 Unit Usaha	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35% (100%)	56,25%	32%	44,00%	137,50%	33%	33%	94,29%
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	67,99%	68%	69,28%	101,88%	69%	69%	98,86%
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 koperasi	335 unit usaha	250 Unit Usaha	345 Unit Usaha	138%	250 Unit Usaha	930 unit usaha	310%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10% (100%)	45,36%	10%	41,30%	413%	10%	10%	100%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	76,63%	75%	98,30%	131,07%	77%	77%	96,25%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	482 orang	580 orang	580 orang	100%	520 Orang	1582 orang	395,5%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2% (100%)	26,37%	1%	41,30%	4130%	1%	1%	50%
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75%	60%	-	-	-	-	-	100%
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	750 Orang	-	-	-	-	-	-	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	26,37%	27%	30,82%	114,15%	28%	28%	93,33%
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	60%	50%	67,93%	135,86%	50%	50%	100%
2.17.06.2.01.03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonom	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	20 kelompok masyarakat	20 kelompok masyarakat	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 koperasi	2910 orang	500 unit usaha	500 unit usaha	100%	500 unit usaha	500 unit usaha	333%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,24%	3%	5,47%	182,33%	3%	3%	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.000 orang	2806 orang	2270orang	1.663 orang	73,26%	600 orang	5.069 orang	168,97%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 Orang	635 Unit Usaha	-	260 Unit Usaha	-	-	895 Unit Usaha	179%
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	500 orang	200 unit usaha	100 Unit Usaha	443 Unit Usaha	443%	200 Unit Usaha	843 Unit Usaha	168,6%
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	-	-	-	-	90 unit usaha	90 unit usaha	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	1000 orang	491 unit usaha	410 Unit Usaha	491 Unit Usaha	119,76%	240 Unit Usaha	1222 Unit Usaha	122,2%
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	1000 orang	580 orang	500 Orang	500 orang	100%	490 Orang	1570 Orang	157%
2.17.07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	350 unit usaha	350 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	400 unit usaha	400 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	900 Orang	1260 Orang	1880 orang	149,21%	1540 Orang	4320 Orang	576%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25% (100%)	47,89%	20%	53,28%	266,4%	20%	20%	80%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	200 orang	100 orang	1.954 orang	1944%	100 Orang	2254 orang	375%
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3000 orang	3680 unit usaha	500 Unit Usaha	1954 Unit Usaha	390,80%	-	5634 orang	187,8%
		Pengembangan Co Working Space	1 paket	1 paket	-	-	-	-	1 paket	100%
2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	-	1200 Unit Usaha	1200 Unit Usaha	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (40%)	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	46 dok	18 dok	9 dok	9 dok	100%	9 dok	36 dok	78,26%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	4 dok	2 dok	3 dok	150%	3 dok	10 dok	100%
		Jumlah Dokumen RTP	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
		Jumlah Dokumen Renstra SKPD	1 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	6 dok	3 dok	3 dok	133,33%	3 Laporan	12 dok	80%
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	2 dok	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100% (80%)	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100% (80%)	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	6 jenis	3 paket	3 Paket	100%	2 Paket	6 jenis	200%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	10 jenis	5 Paket	5 Paket	100%	7 Paket	10 Jenis	200%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	50 Paket	74 Paket	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 paket	8 Paket	100%	8 Paket	8 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	2 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	500 orang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	80%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	80%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	133,33%	2 Dokumen	5 dokumen	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 jenis	3 Unit	3 Unit	6 Unit	200%	10 Unit	19 Unit	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	2 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	3 Unit	5 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 laporan	-	12 laporan	24 laporan	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	3 Unit	300%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	25 unit	26 unit	26 unit	100%	27 Unit	27 Unit	108%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	0	1 unit	0	100%	1 Unit	1 Unit	80%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	5 jenis	51 Unit	51 Unit	100%	70 Unit	5 Jenis	100%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	-	-	-	-	-	-	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
					55 orang	55 orang	100%	77 orang/ bulan	77 orang/ bulan	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
					12 dok	12 dok	100%	12 dok	24 dok	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	6 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	12 dok	80%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 laporan	80%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 dok	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	7 laporan	70%
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3% (100%)	3% (0,6%)	3%	0,%	0,00%	3%	6%	200%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	30 koperasi	15 koperasi	28 koperasi	186,67%	15 koperasi	73 koperasi	97,33%
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 koperasi	160 unit usaha	80 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100%	25 Unit Usaha	265 Unit Usaha	176,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	1 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	100%	2 koperasi	5 koperasi	50%
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 koperasi	152 unit usaha	140 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150%	25 Unit Usaha	327 Unit Usaha	218%
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50% (100%)	50,55% (10,1)	50%	68,34%	136,68%	50%	50%	100%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	370 koperasi	200 koperasi	100 koperasi	50%	100 koperasi	570 koperasi	690,83%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 koperasi	250 Unit Usaha	-	-	-	-	250 Unit Usaha	142,86%
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 koperasi	240 Unit Usaha	-	-	-	-	240 Unit Usaha	208,33%
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	250 unit usaha	503 unit usaha	201,20%	250 Unit Usaha	753 Unit Usaha	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35% (100%)	56,25%	32%	44,00%	137,50%	33%	33%	94,29%
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	67,99%	68%	69,28%	101,88%	69%	69%	98,86%
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 koperasi	335 unit usaha	250 Unit Usaha	345 Unit Usaha	138%	250 Unit Usaha	930 unit usaha	310%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10% (100%)	45,36%	10%	41,30%	413%	10%	10%	100%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	76,63%	75%	98,30%	131,07%	77%	77%	96,25%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	482 orang	580 orang	580 orang	100%	520 Orang	1582 orang	395,5%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2% (100%)	26,37%	1%	41,30%	4130%	1%	1%	50%
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75%	60%	-	-	-	-	-	100%
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	750 Orang	-	-	-	-	-	-	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	26,37%	27%	30,82%	114,15%	28%	28%	93,33%
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	60%	50%	67,93%	135,86%	50%	50%	100%
2.17.06.2.01.03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonom	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	20 kelompok masyarakat	20 kelompok masyarakat	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 koperasi	2910 orang	500 unit usaha	500 unit usaha	100%	500 unit usaha	500 unit usaha	333%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,24%	3%	5,47%	182,33%	3%	3%	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.000 orang	2806 orang	2270orang	1.663 orang	73,26%	600 orang	5.069 orang	168,97%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 Orang	635 Unit Usaha	-	260 Unit Usaha	-	-	895 Unit Usaha	179%
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	500 orang	200 unit usaha	100 Unit Usaha	443 Unit Usaha	443%	200 Unit Usaha	843 Unit Usaha	168,6%
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	-	-	-	-	90 unit usaha	90 unit usaha	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	1000 orang	491 unit usaha	410 Unit Usaha	491 Unit Usaha	119,76%	240 Unit Usaha	1222 Unit Usaha	122,2%
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	1000 orang	580 orang	500 Orang	500 orang	100%	490 Orang	1570 Orang	157%
2.17.07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	350 unit usaha	350 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	400 unit usaha	400 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	900 Orang	1260 Orang	1880 orang	149,21%	1540 Orang	4320 Orang	576%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25% (100%)	47,89%	20%	53,28%	266,4%	20%	20%	80%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	200 orang	100 orang	1.954 orang	1944%	100 Orang	2254 orang	375%
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3000 orang	3680 unit usaha	500 Unit Usaha	1954 Unit Usaha	390,80%	-	5634 orang	187,8%
		Pengembangan Co Working Space	5 paket	-	-	-	-	-	-	100%
2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	-	1200 Unit Usaha	1200 Unit Usaha	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melaksanakan 8 program, 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
 - a. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
 - b. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur
 - c. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
- 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
- 3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi.
- 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
Persentase Koperasi sehat.
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
 - a. Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan
 - b. Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan
- 6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
Persentase koperasi yang meningkat omsetnya.
- 7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan.
- 8) Program Pengembangan UMKM**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya

Mengingat renja tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra periode 2021-2025 maka rata rata capaian realisasi adalah diatas 80%, namun ada beberapa target yang tergolong paling rendah, yaitu Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (50%), hal tersebut karena adanya perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha berbasis Resiko.

Adapun capaian program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dengan capaian sebesar 100%, yaitu :

- 1) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota (100%)
- 2) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (100%).

Selain itu terdapat beberapa program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran dengan capaian di atas 100%, yang mencerminkan kinerja pelaksanaan yang sangat baik. Program dan kegiatan tersebut antara lain :

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (690,83%)
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (168,97%)
- 3) Program Pengembangan UMKM, khususnya pada kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha (375%);

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		24.169.289.780	21.025.930.690	87,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.674.610.355	10.717.987.308	91,81
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.493.300	56.146.051	87,06
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.738.600	28.403.296	95,51
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.900	2.153.900	58,87
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.258.900	2.543.500	59,72
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.934.900	697.225	36,03
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.234.900	1.026.920	45,95
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.667.100	21.321.210	94,06

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.973.739.600	9.616.004.000	96,41
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.722.089.000	9.369.487.960	96,37
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.080.000	245.720.000	98,26
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	406.900	60,42
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	897.200	389.140	43,37
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	971.558.446	843.718.524	86,84
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.543.255	164.680.000	96,56
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	126.131.020	98.321.500	77,95
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.222.030	24.847.600	51,53
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.825.569	9.957.775	31,29
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.210.000	63,02
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	43.838.465	87,68
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	468.030.860	426.513.184	91,13
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.885.712	74.350.000	99,28
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.276.760	19.500.000	96,17
0005	Pengadaan Mebel	20.276.760	19.500.000	96,17
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.660.000	113.922.875	35,75
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	318.660.000	113.922.875	35,75
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.791.540	327.188.742	73,89
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	23.403.375	58,58
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.250.840	274.725.367	74,20
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.590.700	29.060.000	89,17
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	160.941.690	141.851.900	88,14
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	72.083.900	87,31
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	72.083.900	87,31
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	69.768.000	89,01
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	69.768.000	89,01

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	475.289.000	425.084.340	89,44
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	475.289.000	425.084.340	89,44
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	475.289.000	425.084.340	89,44
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	304.231.220	260.034.765	85,47
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	304.231.220	260.034.765	85,47
0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	304.231.220	260.034.765	85,47
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	657.194.500	518.156.626	78,84
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	657.194.500	518.156.626	78,84
0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	657.194.500	518.156.626	78,84
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.507.615.933	2.033.345.845	81,09
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.507.615.933	2.033.345.845	81,09
0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.507.615.933	2.033.345.845	81,09
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.309.150.906	2.712.856.127	81,98
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.309.150.906	2.712.856.127	81,98
0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	228.341.940	175.584.421	76,90
0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.424.782.650	1.079.866.844	75,79
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	415.340.000	345.180.058	83,11
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.240.686.316	1.112.224.804	89,65
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.963.346.885	3.958.120.895	79,75
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.963.346.885	3.958.120.895	79,75
0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	4.963.346.885	3.958.120.895	79,75

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebesar Rp 24.169.289.780,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 22.069.289.780 dan dari DBHCHT sebesar Rp. 2.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21.025.930.690,- atau sebesar 87 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.143.359.090,- atau sebesar 13 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah melaksanakan fungsi sebagai Dinas Teknis di bidang koperasi dan UKM di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58,91	59,72	59,80
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17,17	17,40	17,50
Sasaran :									
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	77,04	77,58	77,60
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77.20	77.50	77.75	78.00	78.50	80	80,25	80,35
Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	42,53	44,41	45

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) **“Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase koperasi yang berkualitas”.

Pada tahun 2024 realisasinya indikator ini adalah sebesar 59,72% dari target sebesar 55,00% (capaian sebesar 108,58%); dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi jumlah seluruh koperasi (aktif) = $341/571 \times 100\%$

- 2) **“Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha”.

Pada tahun 2024 realisasinya indikator ini adalah sebesar 17,40% dari target sebesar 14,00% (capaian 124,29%), dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah usaha mikro yang mejadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan = $30.421/174.861 \times 100\%$

b. Sasaran :

- 1) **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi”** dengan indikator “Persentase koperasi aktif”.

Pada tahun 2024 realisasinya indikator ini adalah sebesar 77,58% dari target sebesar 77% (capaian 100,75%), dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah Koperasi Aktif dibagi jumlah seluruh koperasi = $571/736 \times 100\%$.

- 2) **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** dengan indikator “Nilai AKIP”

Pada tahun 2024 AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapat nilai 80,25 dari target sebesar 77,75 (capaian 103,22%).

- 3) **“Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”** dengan indikator “Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”.

Pada tahun 2024 realisasinya indikator ini adalah sebesar 44,41% dari target sebesar 40% (capaian 111,03%). dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah wirausaha baru yg berskala mikro tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah wirausaha berskala mikro tahun 2021 = $(30.421-21.064)/21.065 \times 100\%$.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
	Persentase Fasilitasi Penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi)	45.00	47.00	49.00	51.00	53.00	80,03	85,60	85,70
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5,03	5,03	5,03
	Persentase Pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	8,04	8,00	8,00
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17,17	17,40	17,60

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara umum menunjukkan capaian yang sangat positif selama periode 2022 hingga 2024. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Salah satu indikator dengan peningkatan paling signifikan adalah **persentase fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK)**. Pada tahun 2023, capaian realisasi mencapai 80,03%, jauh melebihi target sebesar 47%. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 85,60%, yang kembali melampaui target sebesar 49%. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan program fasilitasi dan digitalisasi data koperasi di Kota Semarang.

Sementara itu, pada indikator **persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan**, capaian realisasi menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten dengan target. Selama dua tahun berturut-turut, yaitu 2023 dan 2024, target sebesar 5% berhasil dicapai dengan realisasi masing-masing sebesar 5,03%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program dukungan pembiayaan bagi koperasi telah berjalan secara efektif dan terencana, meskipun peningkatannya relatif tidak signifikan. Stabilitas capaian ini juga mengindikasikan adanya konsistensi dalam penyaluran dan pengawasan bantuan pembiayaan oleh pemerintah daerah.

Untuk indikator **persentase pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan**, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Realisasi tahun 2023 mencapai 8,04%, dua kali lipat dari target yang ditetapkan sebesar 4%. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 8,00%, masih jauh di atas target tahunan. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan dan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro telah berhasil meningkatkan akses permodalan, serta mendorong tumbuhnya sektor usaha mikro di Kota Semarang.

Selanjutnya, indikator **persentase usaha mikro dan kecil (UMK)** juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Realisasi tahun 2023 tercatat sebesar 17,17%, melampaui target sebesar 13%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 17,40% dengan target 14%. Proyeksi tahun

2025 sebesar 17,60% memperlihatkan adanya pertumbuhan berkelanjutan sektor UMK, yang menandakan peran penting Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memperluas basis pelaku ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah berjalan dengan baik dan efektif. Keberhasilan ini mencerminkan peningkatan kualitas fasilitasi, pembiayaan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di tingkat kota.

Selain Indikator Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sudah disebutkan di atas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah IKK pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah yang meliputi 2 indikator outcome dan 20 indikator output.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah sesuai kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				Proyeksi Capaian Th. 2025
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1.	Meningktanya Koperas yang berkualitas		54,02 %	48,22%	58,91 %	59,72%	59,86
		1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotan dalam daerah kabupaten/kota	13,83 %	10,60%	0,58%	0 %	1,14%
		2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan I dalam daerah kabupaten/kota	100 %	100%	0 %	0 %	0%
		3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	77,78 %	50,55%	50,68%	68,34%	51,90%
		4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dan dalam daerah kabupaten/kota	61,38%	36,98	67,40%	69,28%	69,40%
		5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	49,44 %	45,36	45,52%	41,30%	49,57%
		6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,24 %	0,24	0,26%	0,42%	0,47%

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				Proyeksi Capaian Th. 2025
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
		7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,86 %	48,22%	45,38%	46,33%	49,43%
		8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	3,61 %	4,64%	5,05%	5,03%	5,03%
		9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	74,58 %	76,09%	80,03%	85,60%	87%
		10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk operasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,61 %	4,64%	5,03%	5,03%	5,03%
		11) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,22 %	6,42%	11,96%	0,54%	0,86%
		12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	95,56 %	38,39	67,93%	62,23	65,42%
		13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,61 %	13,66%	20,65%	5,16%	6,00%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		12,05%	16,93%	17,17%	17,40%	17,61%
		1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20,24 %	28,86%	42,53%	44,41%	46,14%
		2) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) (SI UMI/Sistem internal Dinkop)	100 %	100%	100%	100%	100%
		3) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,85 %	2,13%	2,76%	3,58%	4,87%
		4) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	5,67 %	6,13	7,13%	8,17%	8,89%
		5) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	37,86 %	27,81	31,09%	34,89%	3725%
		6) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	28,22 %	20,38	23,10%	23,78%	24,48%
		7) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	7,05 %	7,21	9,23%	14,30%	16,16%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Dari capaian Indikator Kinerja kunci (IKK) tersebut diatas, 2 indikator Outcome pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 sedangkan pada indikator output rata-rata juga mengalami peningkatan namun terdapat 2 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Tidak tercapainya target tersebut diatas karena adanya perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam setelah disahkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi, dimana koperasi mengalami kesulitan dalam pemenuhan syarat izin usaha simpan pinjam, sebagai berikut :

- a. Bukti modal setor yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha simpan pinjam yang sebelumnya Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-, dimana Sebagian besar koperasi Kota Semarang memiliki aset masih dibawah Rp. 500.000.000,- yaitu sebanyak 516 Koperasi yang terdiri dari 348 Koperasi aktif dan 168 Koperasi tidak aktif, sehingga tidak mungkin bisa memenuhi syarat yang ditentukan;
- b. Surat Keterangan Lulus Uji Kelayakan Pengurus dan Pengawas, Koperasi harus mengacu pada ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Deputy Bidang Perkoperasian No. 33 tahun 2021 tentang Pedoman Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Pengurus Dan Pengawas Koperasi. Ketentuan ini menyulitkan koperasi binaan Kota Semarang karena juknis tersebut dipersyaratkan bagi koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4, sementara koperasi yang ada di Kota Semarang masih masuk di KUK 1 dan 2, dengan total anggota masih dibawah 10.000, total aset dibawah Rp. 100.000.000,-, dan total modal sendiri dibawah Rp. 15.000.000.000,-. Berdasarkan data koperasi kota semarang, jumlah koperasi KUK 1 dan 2 sebanyak 726 koperasi (558 koperasi aktif, dan 168 koperasi tidak aktif), dan yang sudah masuk ke KUK 3 dan 4 hanya 6 koperasi;
- c. Sertifikat Kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi pengelola membutuhkan biaya Rp. 2.500.000,-, sehingga pada saat disosialisasikan kepada Gerakan Koperasi, Sebagian besar belum siap untuk memenuhi hal tersebut.

Adapun yang sudah dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait hal tersebut diatas adalah melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta pendampingan kepada koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam untuk dapat segera mengajukan ijin usaha Simpan Pinjam sesuai peraturan yang terbaru.

Sedangkan dari proyeksi tahun 2025 optimis semua indikator kinerja kunci baik outcome dan output akan meningkat dari tahun 2024 kecuali pada indikator “Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan I dalam daerah kabupaten/kota” karena masih terkendala persyaratan atas perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tersebut diatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha berbasis Resiko sehingga berimbas juga ada pembukaan kantor cabang simpan pinjam.

Selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Responsif Gender
Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Anggaran	Penjelasan Responsif Gender
			KODE REKENING	NOMENKLATUR	OUTPUT		
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	82.558.990	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus koperasi baik laki-laki maupun perempuan
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 02 2.02 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	78.382.700	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus koperasi baik laki-laki maupun perempuan
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2 17 03 2.01 01	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	475.289.000	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus koperasi baik laki-laki maupun perempuan
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	304.231.220	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus koperasi baik laki-laki maupun perempuan
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	657.194.500	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus dan anggota koperasi baik laki-laki maupun perempuan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 06 2.01 01	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.507.615.933	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus dan anggota koperasi baik laki-laki maupun perempuan serta melaksanakan sosialisasi perkoperasian kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan dan defabel

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Anggaran	Penjelasan Responsif Gender
			KODE REKENING	NOMENKLATUR	OUTPUT		
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	228.341.940	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pelaku usaha mikro baik laki-laki maupun perempuan
			2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1.424.782.650	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pelaku usaha mikro baik laki-laki maupun perempuan
			2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (GAB/GBS)	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dlm Pemberdayaan Usaha Mikro	415.340.000	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pelaku usaha mikro baik laki-laki maupun perempuan
			2 17 07 2.01 15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (GAB/GBS)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1.240.686.316	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pelaku usaha mikro baik laki-laki maupun Perempuan, Lansia, difabel
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2 17 08 2.01 06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (GAB/GBS)	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	4.963.346.885	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pelaku usaha mikro baik laki-laki maupun Perempuan serta pelaku usaha Difabel

- Dari 8 program, 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 7 program (87,50 %), 8 kegiatan (57,14 %) dan 11 sub kegiatan (32,35 %).
- Dari Total anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp. 24.169.289.780,- tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 12.377.770.134,- (51,21 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 6.619.373.201,- (27,39 %) dengan rincian sebagai berikut:

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai dinas teknis dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai DenganTahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATU AN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			PROYEKSI CAPAIAN Th. 2025	CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024		
ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	Persentase koperasi aktif	%	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	76,63	77,04	77,58	77,60	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	16,93	17,17	17,40	17,50	
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	65,42	58,91	59,72	59,80	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Dari indikator Kinerja Daerah (IKD) pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil menengah tersebut diatas, dapat disimpulkan catatan analisisnya sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Aktif

Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2022–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat dan secara konsisten telah melampaui target Renstra. Hal ini mencerminkan efektivitas pembinaan kelembagaan, pendataan koperasi, serta upaya reaktivasi koperasi tidak aktif. Proyeksi capaian tahun 2025 akan tercapai dan sejalan dengan target, dengan tetap memperhatikan kesinambungan pembinaan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas tata kelola koperasi.

2. Meningkatkan Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha

Capaian indikator meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha selama periode 2022–2024 berada jauh di atas target Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi legalitas usaha, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan capaian tetap meningkat, namun perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha agar wirausaha yang tumbuh mampu bertahan dan berkembang serta peningkatan pemahaman digitalisasi.

3. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Realisasi indikator koperasi berkualitas pada tahun 2022–2024 menunjukkan hasil yang melebihi target Renstra, meskipun laju peningkatannya relatif moderat. Capaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan koperasi terhadap aspek kelembagaan, manajemen, dan kesehatan koperasi. Proyeksi capaian tahun 2025 diperkirakan tetap meningkat, dengan catatan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, pendampingan berkelanjutan, serta penerapan prinsip tata kelola koperasi yang baik.

Selanjutnya masih terkait pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. SIMDAKOP (Sistem Informasi Data Koperasi)

SIMDAKOP adalah sistem informasi berbasis on line data koperasi di Kota Semarang untuk memberikan informasi keberadaan dan kondisi koperasi Kota Semarang.

b. SIPONPENKES (Sistem Penilaian Online Penilaian Kesehatan Koperasi)

SIPONPENKES adalah sistem penilaian kesehatan koperasi berbasis on line di Kota Semarang untuk memberikan informasi kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam.

c. SI-UMI (Sistem Informasi Usaha Mikro)

SI-UMI adalah platform digital bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang. Bertujuan untuk membangun jejaring kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan berbagai macam platform, seperti marketplace dan toko modern lainnya.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah berjalan cukup efektif, namun masih membutuhkan peningkatan dalam aspek kualitas layanan, pemerataan pendampingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Masih perlunya peningkatan ketrampilan dan kapasitas SDM Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang secara berkelanjutan serta pelatihan yang berjenjang dan berbasis digitalisasi.
- c. Perlunya pendampingan dan pembinaan Kelembagaan serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan koperasi yang mandiri dan usaha mikro yang berdaya saing.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang diantaranya:

1. Belum optimalnya kelembagaan dan tata kelola koperasi yang sehat, Akuntabel, transparan, dan professional.

Hal ini antara lain disebabkan karena masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan kompetensi SDM pengelola/pengurus koperasi.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan kualitas koperasi dari segi kelembagaan, keuangan maupun usahanya melalui Inkubasi Koperasi, memberikan fasilitasi uji kompetensi bagi pengurus/pengelola koperasi serta fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan bagi koperasi sehingga terwujud koperasi yang sehat, mandiri, meningkat aset dan omsetnya.

2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro.

Hal ini antara lain disebabkan karena masih rendahnya pemahaman manajemen usaha, akuntansi Keuangan serta penerapan prinsip kewirausahaan modern, teknologi dan digitalisasi usaha pelaku usaha mikro dalam mengelola usahanya.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan pelatihan yang lebih efektif melalui Inkubasi UMKM dan meningkatkan pelatihan terkait manajemen kewirausahaan, teknologi dan platform digital bagi pelaku usaha mikro.

3. Belum optimalnya akses permodalan bagi Koperasi dan usaha mikro

Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan jaminan serta rendahnya literasi keuangan pelaku usaha.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menghadapi masalah ini adalah memfasilitasi kemitraan dengan Lembaga keuangan serta meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku usaha.

4. Belum optimalnya kemampuan pemasaran dan pengembangan produk bagi koperasi dan usaha mikro.

Hal ini antara lain disebabkan karena masih terbatasnya akses pemasaran kurangnya inovasi produk serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam promosi.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain memberikan pelatihan pemasaran digital, membantu pelaku usaha mengikuti pameran, memfasilitasi kemitraan usaha dengan marketplace, dan mendorong kolaborasi antar usaha untuk memperluas jaringan pemasaran.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Akses Permodalan yang Terbatas

Banyak UMKM dan koperasi kesulitan memperoleh pinjaman karena keterbatasan jaminan dan rekam jejak keuangan.

2) Kurangnya Literasi Keuangan dan Digital

Masih banyak pelaku usaha yang belum melek teknologi dan keuangan, sehingga kesulitan dalam pencatatan, pemasaran, dan manajemen usaha.

3) Kualitas SDM yang Belum Merata

Rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan menghambat pertumbuhan Pelaku usaha Mikro.

4) Legalitas dan Kepatuhan Regulasi

Banyak UMKM belum berbadan hukum atau belum memiliki izin usaha, membuat mereka sulit mengakses bantuan dan pembiayaan formal.

5) Persaingan Pasar yang Ketat

Persaingan dengan produk impor dan brand besar membuat UMKM perlu meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk.

6) Kapasitas Produksi dan Skala Usaha Terbatas

Sulit memenuhi permintaan pasar besar karena keterbatasan sumber daya dan teknologi

b. Peluang

1) Kontribusi Besar Terhadap Ekonomi

- UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja.
- Koperasi memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi berbasis komunitas.

2) Dukungan Pemerintah

- Adanya kebijakan pro UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan digital, dan kemudahan perizinan (OSS).
- Program-program pemberdayaan dan stimulus ekonomi pascapandemi.

3) Transformasi Digital

- E-commerce dan fintech membuka akses pasar dan pembiayaan lebih luas.
- Digitalisasi memungkinkan efisiensi operasional dan perluasan jangkauan.

4) Potensi Pasar Domestik yang Besar

- Populasi Indonesia yang besar menjadi pasar potensial untuk produk UMKM dan koperasi.
- Tren produk lokal dan ramah lingkungan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk UMKM.

5) Kolaborasi dan Kemitraan

- Peluang kerja sama dengan swasta (CSR), BUMN, maupun lembaga internasional.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kelembagaan dan tata kelola koperasi yang sehat dan profesional, sehingga kinerja koperasi belum optimal dalam memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.
- b. Rendahnya kapasitas manajerial dan kelembagaan pengurus koperasi termasuk KKMP, dalam hal tata kelola organisasi, akuntabilitas keuangan, maupun kemampuan perencanaan usaha.
- c. Masih rendahnya kapasitas dan keterampilan pelaku usaha mikro dalam mengelola usaha secara produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

- d. Masih Rendahnya kualitas dan daya saing produk usaha mikro, baik dari segi mutu, kemasan, legalitas usaha, maupun standar sertifikasi (halal, PIRT, HAKI dan lainnya).
- e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk usaha mikro, sehingga jangkauan pasar masih terbatas pada lingkup lokal.
- f. Terbatasnya akses permodalan dan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro, akibat rendahnya literasi keuangan serta belum maksimalnya dukungan lembaga keuangan dan penjaminan.
- g. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro berbasis potensi unggulan daerah, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah **“Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”** dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--|
| Prioritas Daerah 1. | Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; |
| Prioritas Daerah 2. | Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan; |
| Prioritas Daerah 3. | Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota; |
| Prioritas Daerah 4. | Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia; |
| Prioritas Daerah 5. | Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan; |
| Prioritas Daerah 6. | Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota. |

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan);

Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;

- b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklamasi, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
 - c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.
2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMS/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUMS/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMS dan BUMDes; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan.

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan Jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Sronдол - Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara - Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
 - a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
 - b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital.
 - c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitas untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitas penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitas pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

- d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export/ Internasional* (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up*; dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Investment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen

pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatkan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

- | | | |
|----|----------------------------------|----------------|
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi | : 5,90 – 6,30% |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka | : 5,40-5,10% |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | : 86,25 |
| 4. | Tingkat Kemiskinan | : 3,86-3,74% |

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendukung pencapaian **prioritas kelima**, yaitu **“Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan”**. Dengan Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export/ Internasional* (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up*; dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				26.648.801.775	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				29.513.748.434	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	55%	506.488.503	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	55%	522.543.070	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Kota Semarang	1. Persentase koperasi yang diawasi	23%	294.684.220	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Kota Semarang	1. Persentase koperasi yang diawasi	23%	345.746.860	
			2. Persentase koperasi yang diperiksa	32%	211.804.283			2. Persentase koperasi yang diperiksa	32%	176.796.210	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	134	294.684.220	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	134 Unit Usaha	345.746.860	
				184	211.804.283				184 Unit Usaha	176.796.210	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	44,1%	396.015.519	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	44,1%	304.866.930	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	396.015.519	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	304.866.930	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	396.015.519	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	304.866.930	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	41,35%	604.287.223	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	41,35%	423.651.260	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	80%	604.287.223	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	80%	423.651.260	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	560 org	604.287.223	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 org	423.651.260	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang berkualitas	59,74%	2.101.350.498	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang berkualitas	59,74%	2.012.252.430	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	1%	475.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	1%	873.064.800	
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	475.000.000	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	40 Kelompok Masyarakat	873.064.800	
		Kota Semarang	2. Persentase peningkatan volume usaha koperasi	31%	1.626.350.498		Kota Semarang	2. Persentase peningkatan volume usaha koperasi	31%	1.139.187.630	
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	120 Unit Usaha	300.000.000	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	120 Unit Usaha	141.148.600	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	1.226.350.498	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	924.676.780	
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	50 Unit Usaha	100.000.000	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	150 Unit Usaha	73.362.250	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	67%	6.484.300.570	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	67%	5.454.088.600	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	1. Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan usaha	26%	800.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	1. Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan usaha	26%	161.000.000	
		Kota Semarang	2. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	25%	200.000.000		Kota Semarang	2. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	25%	430.286.050	
		Kota Semarang	3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	71,40%	2.484.300.570		Kota Semarang	3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	71,40%	2.417.898.765	
		Kota Semarang	4. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha	55%	3.000.000.000		Kota Semarang	4. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha	55%	2.444.903.785	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	225 Unit Usaha	800.000.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	230 Unit Usaha	161.000.000	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	200.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	430.286.050	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	180 Unit Usaha	784.300.570	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	420 Unit Usaha	768.341.510	
	Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit usaha	425.000.000	Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit usaha	650.000.000	
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300 unit usaha	1.275.000.000	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300 unit usaha	999.557.255	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1570 org	3.000.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	4340 org	2.444.903.785	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	3.822.403.681	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	5.160.554.388,98	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet	25%	400.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet	25%	424.713.950	
		Kota Semarang	2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	30%	2.372.403.681		Kota Semarang	2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	30%	3.522.744.018	
		Kota Semarang	3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	25%	200.000.000		Kota Semarang	3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	25%	836.043.320	
		Kota Semarang	4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	20%	850.000.000		Kota Semarang	4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	20%	377.053.100	
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	400.000.000	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	424.713.950	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	700 Unit Usaha	3.422.403.681	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2245 Unit Usaha	4.735.840.438,98	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang berkualitas	100%	11.472.164.307	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang berkualitas	100%	12,104,661,420	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan	100%	34.677.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan	100%	63,619,620	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	4,376,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1,192,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1,192,500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	318,100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	850.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	318,100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.077.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	9,226,400	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	25.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	46,995,620	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan	100%	11.430.599.707	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan	100%	12,041,041,800	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 org/bln	11.158.999.707	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 org/bln	11,751,268,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	270.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	288,720,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	208,800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	636,200	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	208,800	
		Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90%	1.261.791.474		Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90%	3,531,130,334	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	80	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	80	36,711,270	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5,480,470	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	31,230,800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	100%	306.887.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	100%	871,120,669	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	151,865,085	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	21.887.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	39,871,200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	480,893,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	168,491,384	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	100%	138,346,559	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	138,346,559	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100%	530.791.474	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100%	1,352,024,680	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	156,030,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.791.474	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,195,994,680	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai ketentuan	100%	351.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai ketentuan	100%	1,132,927,156	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,600,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	370,356,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	191 Unit	73,620,956	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	649,350,200	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat diaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat hasil musrenbang untuk Tahun 2026 yang ditujukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Support Anggaran Rakor UMKM Kecamatan, Pelatihan Packaging untuk Produk UMKM dan Pemasarannya	Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Packaging dan Pemasaran	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan koperasi karang taruna	Kel. TanjungMas Kec. Semarang Utara	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
3.	Sosialisasi/Pelatihan Produk Halal	Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas sertifikasi Halal	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi
4.	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis SDM Lokal	Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
5.	Pelatihan Membuka Usaha Umkm Melalui Luring Maupun Daring	Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
6.	Pelatihan Packing makanan	Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Packaging	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Pelatihan Memasak olahan ikan Laut	Kel. Bandharharjo Kec. Semarang Utara	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
8.	Pelatihan Packing makanan	Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Packaging	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
9.	Bimtek Perolehan Ijin Sertifikasi Halal	Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi sertifikasi Halal	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi
10.	Pelatihan UMKM, Sertifikat Halal, PIRT, Izin Usaha	Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi sertifikasi Halal/PIRT	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi
11.	Sosialisasi Digitalisasi UMKM	Kel. Plalangan Kec. Gunungpati	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi pelatihan digitalisasi pemasaran	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
12.	Sosialisasi PIRT dan K3 Produk Olahan Pangan	Kel. Plalangan Kec. Gunungpati	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
13.	Pelatihan Entrepreneurship dan Kewirausahaan (pembuatan buket, ganci, gantungan HP)	Kel. Kandri Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
14.	Pelatihan dan bantuan modal UMKM	Kel. Sukorejo Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
15.	Pelatihan Marketing Digital dan Pembuatan Konten Pemasaran	Kel. Bendan Duwur. Kec. Gajahmungkur	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi pelatihan digitalisasi pemasaran	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
16.	Pelatihan administrasi UMKM dan permodalan bagi UMKM	Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir
17.	Meningkatkan Produktivitas UMKM	Kel. Sendang Mulyo Kec. Tembalang	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Sosialisasi ketrampilan UMKM	Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
19.	Guna meningkatkan produktifitas pemasaran produk secara online masyarakat	Kel. Sendang Mulyo Kec. Tembalang	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas pelatihan digitalisasi pemasaran	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
20.	Diperlukan pelatihan wirausaha anak remaja dan ibu	Kel. Sendang Mulyo Kec. Tembalang	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
21.	Pelatihan Menjahit	Kel. Jangli Kec. Tembalang	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
22.	Pelatihan Packaging	Kel. Jangli Kec. Tembalang	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Packaging	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
23.	Pelatihan Membuat Hantaran	Kel. Bulusan Kec. Tembalang	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
24.	Pelatihan Sulam Pita	Kel. Bulusan Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas pelatihan sulam pita	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
25.	Pelatihan PACKAGING dan Pemasaran	Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Packaging	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Dari 25 Usulan Program dan Kegiatan tersebut diatas, sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah sebanyak 19 Usulan dapat diakomodir dan sebanyak 6 usulan tidak bisa diakomodir karena merupakan Tupoksi Perangkat Daerah yang lain dan sudah difasilitasi oleh Bappeda Kota Semarang.

Selain usulan tersebut diatas juga terdapat aspirasi pikir DPRD Kota Semarang yang akan diakomodir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026, yaitu :

Tabel 2. 10
Usulan Pokir DPRD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
1	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahaan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Pedurungan	1	Paket	30.000.000
2	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahaan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Genuk	1	Paket	30.000.000
3	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahaan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Gayamsari	1	Paket	30.000.000
4	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahaan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Pedurungan	1	Paket	30.000.000
5	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahaan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Genuk	1	Paket	30.000.000
6	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahaan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Gayamsari	1	Paket	30.000.000

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
7	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Butuh pembuatan display untuk produk usaha umkm, karena potensi umkm warga setempat (batik ecoprint, kerajinan rajut, minuman sehat, dan produk dari eco enzym) sangat potensial untuk dikembangkan	Kecamatan Banyumanik	20	M	150.000.000
8	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gunungpati	1	Kegiatan	50.000.000
9	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gunungpati	1	Kegiatan	50.000.000
10	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gunungpati	1	Kegiatan	50.000.000
11	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Banyumanik	1	Kegiatan	50.000.000
12	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Banyumanik	1	Kegiatan	50.000.000
13	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gajahmungkur	1	Kegiatan	50.000.000
14	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gunungpati	1	Kegiatan	100.000.000
15	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gunungpati	1	Kegiatan	100.000.000
16	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		PERLU KEGIATAN YANG LEBIH MASIF	Kecamatan Banyumanik	1	Kegiatan	100.000.000
17	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Olahan Ketela (50 Orang)	Kecamatan Tembalang	1	Paket	51.909.840

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
18	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Olahan Ketela (50 Orang)	Kecamatan Tembalang	1	Paket	51.909.840
19	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Olahan Ketela (50 Orang)	Kecamatan Candisari	1	Paket	51.909.840
20	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (30 Orang)	Kecamatan Tembalang	1	Paket	46.634.595
21	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (30 Orang)	Kecamatan Tembalang	1	Paket	46.634.595
22	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (30 Orang)	Kecamatan Candisari	1	Paket	46.634.595
23	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausahaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Gajahmungkur	1	Paket	30.000.000
24	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausahaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Gajahmungkur	1	Paket	30.000.000
25	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausahaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Gunungpati	1	Paket	30.000.000
26	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausahaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Gunungpati	1	Paket	30.000.000
27	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausahaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Banyumanik	1	Paket	30.000.000

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
28	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausahaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Banyumanik	1	Paket	30.000.000
29	GUMILANG FEBRIYANSYAH W., S.T., M.M.	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	dibutuhkan pelatihan peningkatan SDM UMKM	Kecamatan Gajahmungkur	6	Paket	120.000.000
30	H. JOKO WIDODO, S.Ak.	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (30 Orang)	Menumbukan kemandirian ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.	Kecamatan Semarang Barat	1	Paket	47.000.000
31	H. JOKO WIDODO, S.Ak.	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (30 Orang)	Menumbukan kemandirian ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.	Kecamatan Semarang Selatan	1	Paket	47.000.000
32	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan UMKM	Kecamatan Pedurungan	60	Orang	50.000.000
33	LELY PURWANDARI	-	Pelatihan Olahan Ketela (50 Orang)	Kecamatan Tembalang			51.909.840
34	LELY PURWANDARI	-	Pelatihan Perca (50 Orang)	Kecamatan Tembalang	50	Orang	63.417.310
35	MOH. RODHI	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Dan Pendidikan UMKM	Kecamatan Pedurungan	4	Pertemuan	100.000.000
36	RAHMULYO ADIWIBOWO, S.H., M.H.	-	Kekurang pahaman masyarakat dalam pengolahan Ketela	Kecamatan Pedurungan	50	Orang	51.909.840

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
37	SITI ROIKA, S.Pd.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan pengolahan makanan	Kecamatan Semarang Timur	1	Kegiatan	51.000.000
38	SITI ROIKA, S.Pd.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan pengolahan makanan	Kecamatan Semarang Tengah	1	Kegiatan	51.000.000
39	SITI ROIKA, S.Pd.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan pengolahan makanan	Kecamatan Semarang Utara	1	Kegiatan	51.000.000
40	SITI ROIKA, S.Pd.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausaha masyarakat Semarang Timur agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Semarang Timur	2	Kegiatan	46.000.000
41	SITI ROIKA, S.Pd.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausaha masyarakat Semarang Tengah agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Semarang Tengah	2	Kegiatan	46.000.000
42	SITI ROIKA, S.Pd.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausaha masyarakat Semarang Utara agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Semarang Utara	2	Kegiatan	46.000.000

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
43	SUCIATI, S.K.M.	Kurangnya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Banyumanik, Gunungpati	10	Kegiatan	150.000.000
44	SUHARSONO, S.S., M.Si.	-	Pelatihan Umkm & Wirausaha	Kecamatan Ngaliyan	10	Kegiatan	200.000.000
45	SUHARSONO, S.S., M.Si.	-	Pelatihan Umkm & Wirausaha	Kecamatan Mijen	10	Kegiatan	200.000.000
46	SUHARSONO, S.S., M.Si.	-	Pelatihan Umkm & Wirausaha	Kecamatan Tugu	10	Kegiatan	200.000.000
47	SYAHRUL QIROM, S.T.	Minimnya Kemampuan Manajemen Perluasan Pasar Bagi Usaha Mikro	Sosialisasi pentingnya manajemen usaha bagi UMKM	Kecamatan Semarang Tengah	5	Paket	100.000.000
48	SYAHRUL QIROM, S.T.	Minimnya Kemampuan Manajemen Perluasan Pasar Bagi Usaha Mikro	Pelatihan UMKM	Kecamatan Semarang Tengah	5	Paket	100.000.000
JUMLAH							3.177.870.295

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1
Visi, Tema, dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang**

Produktif dan Inklusif”. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2026 dengan tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**, terdapat penekanan kuat pada penguatan struktur ekonomi nasional yang bertumpu pada produktivitas, inklusivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta peran koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Tema tersebut sejalan dengan RPJMN 2025–2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam konteks tersebut, koperasi dan usaha mikro memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini secara eksplisit tercermin pada Prioritas Nasional, khususnya:

- Prioritas Nasional 2: kemandirian ekonomi melalui penguatan ekonomi rakyat;
- Prioritas Nasional 3: peningkatan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, dan peran aktif koperasi;
- Prioritas Nasional 6: pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Selanjutnya, pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai **Lumbung Pangan Nasional** menuntut penguatan rantai nilai ekonomi, hilirisasi produk, serta pengembangan pelaku usaha mikro dan koperasi agar mampu berperan sebagai penggerak ekonomi lokal dan pendukung ketahanan pangan daerah. Prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah yang menekankan pada **perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan** semakin menegaskan pentingnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, Pemerintah Kota Semarang menetapkan target pembangunan tahun 2026 yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi, terutama pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan tersebut melalui:

- **Pemberdayaan dan penguatan usaha mikro** guna menciptakan lapangan kerja baru dan menurunkan TPT;
- **Pengembangan koperasi yang sehat, modern, dan produktif** sebagai wadah usaha kolektif dan sarana peningkatan kesejahteraan anggota;
- **Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro** melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital;
- **Penguatan peran koperasi dan usaha mikro dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal**, khususnya melalui pengembangan koperasi sektor riil dan usaha mikro berbasis potensi unggulan daerah;
- **Mendorong ekonomi inklusif**, terutama bagi kelompok rentan, perempuan, pemuda, dan pelaku usaha mikro pemula.

Dengan demikian, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Semarang **telah selaras** dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan mampu diimplementasikan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan sehingga kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja di Kota Semarang dapat semakin optimal.

Telaahan ini menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, prioritas program, dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2026 agar selaras dengan RKP Tahun 2026 dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

“Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif ”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **“Rasio Kewirausahaan Daerah (%)”**.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan koperasi aktif dan sehat

Dengan indikator sasaran yaitu **“Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)”**.

2. Meningkatkan usaha mikro yang naik kelas

Dengan indikator sasaran yaitu **“Persentase Usaha Mikro yang naik kelas (%)”**.

3. Meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dengan indikator sasaran yaitu **“Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Angka)” dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Angka).**

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,52
	<i>SASARAN 1</i> Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,86
	<i>SASARAN 2</i> Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	2,11
	<i>SASARAN 3</i> Meningkatnya kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Angka	80,47
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Angka	98,51

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan nasional dan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 – 2029, maka program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				29.513.748.434		
I	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	Kota Semarang	55%	522.543.070	PAD	
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	1. Persentase koperasi yang diawasi	Kota Semarang	23%	345.746.860	PAD	
		2. Persentase koperasi yang diperiksa	Kota Semarang	32%	176.796.210	PAD	
II	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	Kota Semarang	44,1%	304.866.930	PAD	
2.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kota Semarang	70%	304.866.930	PAD	
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Kota Semarang	41,35%	423.651.260	PAD	
3.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	Kota Semarang	80%	423.651.260	PAD	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	Kota Semarang	59,74%	2.012.252.430	PAD	
4.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	Kota Semarang	1%	873.064.800	PAD	
		2.Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Kota Semarang	31%	1.139.187.630	PAD	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	Kota Semarang	67%	5.454.088.600	PAD dan DBHCHT	
5.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan usaha	Kota Semarang	26%	161,000,000	PAD	
		2. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	Kota Semarang	25%	430,286,050	PAD	
		3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pengembangan usaha dan akses pembiayaan	Kota Semarang	71,40%	2,417,898,765	PAD dan DBHCHT	
		4. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pelatihan dan pendampingan usaha	Kota Semarang	55%	2.444.903.785	PAD dan DBHCHT	

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	20%	5.160.554.388,98	PAD	
6.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	25%	424,713,950	PAD	
		2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	30%	3.522.744.018	PAD	
		3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	25%	836.043.320	PAD	
		4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	20%	377,053,100	PAD	
VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang berkualitas	Kota Semarang	100%	12,104,661,420	PAD	
7.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan	Kota Semarang	100%	63,619,620	PAD	
8.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	12,041,041,800	PAD	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kota Semarang	90%	3,531,130,334	PAD	
9.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kota Semarang	80	36,711,270	PAD	
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kota Semarang	100%	871,120,669	PAD	

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
11.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kota Semarang	100%	138,346,559	PAD	
12.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	Kota Semarang	100%	1,352,024,680	PAD	
13.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Kota Semarang sesuai ketentuan	Kota Semarang	100%	1,132,927,156	PAD	

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 7 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 6 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.29.513.748.434,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang sebesar Rp. 28.483.748.434,- dan bersumber dari DBHCHT sebesar Rp.1.030.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki peran dalam pencapaian misi ketiga, yaitu “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak” dan misi keempat, yaitu “Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 7 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 6 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 41 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 15 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.29.513.748.434,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang sebesar Rp. 28.483.748.434,- dan bersumber dari DBHCHT sebesar Rp.1.030.000.000,-

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				29.513.748.434				
2. 17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Kota Semarang		522.543.070				560.072.771
	Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian		55%		PAD	61%		
2. 17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah		Kota Semarang		522.543.070				560.072.771
	1. Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	1. Persentase koperasi yang diawasi		23%	345.746.860	PAD	25%	325.860.521	
	2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan koperasi	2. Persentase koperasi yang diperiksa		32%	176.796.210	PAD	36%	234.212.250	
2. 17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				522.543.070				560.072.771
	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	134 Unit Usaha	345.746.860	PAD		135 Unit Usaha	325.860.521
			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	184 Unit Usaha	176.796.210	PAD		185 Unit Usaha	234.212.250
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				304.866.930				437.912.228
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi sehat	Kota Semarang	44,1%		PAD		44,2%	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		304.866.930				437.912.228
	Meningkatnya pengelolaan koperasi yang sehat sesuai regulasi yang berlaku	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya		70%		PAD		70%	
2.17.04.2.01.00001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro						
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		250 Unit Usaha	304.866.930	PAD		250 Unit Usaha	437.912.228

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Kota Semarang		423.651.260				668.218.167
	Meningkatnya koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan		41,35%		PAD		41,40%	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		423.651.260				668.218.167
	Meningkatnya kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang kompeten		80%		PAD		80%	
2.17.05.2.01.00001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	400 org	423.651.260	PAD		560 org	668.218.167
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian							
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Kota Semarang		2.012.252.430				2.323.664.187
	Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas		59,74%		PAD		59,75%	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		873.064.800				475.000.000
	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi		1%		PAD		1%	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	40 Kelompok Masyarakat	873.064.800	PAD		20 kelompok masyarakat	475.000.000
	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan							
	2. Meningkatnya volume usaha koperasi	2.Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Kota Semarang	31%	1.139.187.630	PAD		31,5%	1.848.664.187
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	120 Unit Usaha	141.148.600	PAD		120 Unit Usaha	350.000.000
	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	500 Unit Usaha	924.676.780	PAD		500 Unit Usaha	1.388.664.187
	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	150 Unit Usaha	73.362.250	PAD		50 Unit Usaha	110.000.000
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya							
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Kota Semarang		5.454.088.600				7.170.311.202
	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)		67%		PAD		69%	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Kota Semarang		5.454.088.600				7.170.311.202
	1. Meningkatkan keberdayaan usaha mikro melalui Fasilitasi Kemitraan Usaha	1. Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan usaha		26%	161,000,000	PAD		28%	850.000.000
	2. Meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	2. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	Kota Semarang	25%	430,286,050	PAD		26%	225.000.000
	3. Meningkatkan Kualitas dan standarisasi Produk usaha mikro serta optimalnya fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro	3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	Kota Semarang	71,40%	2,417,898,765	PAD		73,40%	2.845.311.202
	4. Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, Kapasitas, Kompetensi, SDM Pelaku Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan	4. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha	Kota Semarang	55%	2.444.903.785	PAD		60%	3.250.000.000
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	230 Unit Usaha	161,000,000	PAD		250 Unit Usaha	850.000.000
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	430,286,050	PAD		200 Unit Usaha	225.000.000
	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan							
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	420 Unit Usaha	768,341,510	PAD		180 Unit Usaha	895.311.202
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro							
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	500 Unit usaha	650,000,000	PAD		500 Unit Usaha	450.000.000
	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi							
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	300 Unit Usaha	999,557,255	PAD		300 Unit Usaha	1.500.000.000
	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi							
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4340 org	2.444.903.785	PAD		1600 org	3.250.000.000
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan							
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Kota Semarang		5.160.554.388,98				4.226.797.268
	Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya		20%		PAD		26%	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				5.160.554.388,98				4.226.797.268
	1. Optimalnya inkubasi usaha mikro berbasis sektor unggulan atau klaster lokal	1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas inkubator yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	25%	424,713,950	PAD		26%	425.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	2. Meningkatnya omset Pelaku usaha Mikro yang dibina melalui perluasan akses pemasaran	2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	30%	3.522.744.018	PAD		32%	2.706.797.268
	3. Meningkatnya kapasitas pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk pemasaran produk	3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	25%	836.043.320	PAD		27%	220.000.000
	4. Meningkatnya nilai jual usaha mikro melalui kemasan yang lebih berkualitas	4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	20%	377,053,100	PAD		22%	875.000.000
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	424,713,950	PAD		105 Unit Usaha	425.000.000
	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi							
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2245 Unit Usaha	4.735.840.438,98	PAD		750 Unit Usaha	3.801.797.268
	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi							
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kota Semarang	100%	12,104,661,420	PAD		100%	12.052.046.392
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang berkualitas							
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang	100%	63,619,620	PAD		100%	45.600.000
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 dok	4,376,400	PAD		3 dok	3.500.000
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1,192,500	PAD		1 dok	1.500.000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1,192,500	PAD		1 dok	1.500.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	318,100	PAD		1 dok	750.000
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	318,100	PAD		1 dok	850.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Laporan	9,226,400	PAD		3 Laporan	2.500.000
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	46,995,620	PAD		1 dok	35.000.000
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Semarang		12,041,041,800	PAD			11.993.609.692
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan Keuangan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan		100%		100%			
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	74 org/bln	11,751,268,000	PAD		74 org/bln	11.716.949.692
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 dok	288,720,000	PAD		12 dok	275.000.000
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Laporan	208,800	PAD		1 Laporan	510.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Laporan	636,200	PAD		2 Laporan	600.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD							
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	208,800	PAD		1 dok	550.000
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kota Semarang	90%	3,531,130,334	PAD		90,5%	2.125.144.579
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Semarang		36,711,270	PAD			50.000.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang		80				80,5	
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Dokumen	5,480,470	PAD		1 Dokumen	10.000.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	50 Orang	31,230,800	PAD		50 Orang	40.000.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Semarang		871,120,669	PAD			585.000.000
	Terpenuhi pelayan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang		100%				100%	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	46 Paket	151,865,085	PAD		20 Paket	45.000.000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7 Paket	39,871,200	PAD		5 Paket	25.000.000
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	30,000,000	PAD		12 Laporan	65.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	480,893,000	PAD		12 Laporan	250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro						
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 dok	168,491,384	PAD		2 dok	200.000.000
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Semarang		138,346,559	PAD			242.981.279
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang		100%				100%	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Unit	138,346,559	PAD		4 Unit	242.981.279
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang		1,352,024,680	PAD			660.000.000
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti		100%				100%	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	156,030,000	PAD		12 Laporan	160.000.000
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	1,195,994,680	PAD		12 Laporan	500.000.000
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang		1,132,927,156	PAD			600.000.000
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Kota Semarang sesuai ketentuan		100%				100%	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	39,600,000	PAD		1 Unit	40.000.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	29 Unit	370,356,000	PAD		29 Unit	300.000.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	191 Unit	73,620,956	PAD		20 Unit	60.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Unit	649,350,200	PAD		2 Unit	200.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi							

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

IV.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Persentase koperasi aktif	%	78,05
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	17,64
3.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	64,23
4.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Angka	8.500
5.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	5	1,86

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

Semarang, 11 Desember 2025

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
NOMOR : B/074/500.3/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Tahun 2026, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. Menghimpun data dan informasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026;

- b. Menelaah data dan informasi serta menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 yang selaras dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026;
- c. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA agar berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 27 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN
2026.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Margaritha Mita Dewi Sopa, SE,MM	Kepala Dinas	PenanggungJawab
2	Iin Indriawati Dewi Mayasari, SH	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Sri Yatun, SE	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
4	Sarifah, SE,MM	Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	Anggota
5	Dwi Sunaryani, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	Anggota
6	Nunik Hendrayani, SH, MM	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Anggota
7	R Mohamad Waluyo Sejati,SH, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Anggota
8	Fajar Febrian, SH	Sub Koordinator Kelembagaan	Anggota
9	Bejo Iman Suroso, Se,MM	Sub Koordinator Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Anggota
10	Yuanita Rani Widasari, SSTP	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Anggota
11	Tri Astuti, SE	Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	Anggota
12	Joestina Koesoemaningtyas,SE	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah	Anggota

13	Argya Cadipa Bomantara, S.STP., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
14	Wahyu Widiyatmoko, SE, M.M.	Kepala UPTD PLUT KUMKM	Anggota
15	Aryan Prasetyawan, S.A.P	Penyuluh Koperasi	Anggota
16	Ratna Safitri, S.A.P	Penyuluh Koperasi	Anggota
17	Muhamad Syahrul Apriliyanto, S.Pd	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota
18	Siti Kholisoh, S.Pd	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA